



Pemprov Tak Bisa Jelaskan APBD

PEKANBARU, TRIBUN - Pemprov Riau tidak dapat menjelaskan minimnya realisasi APBD 2014 kepada Badan Anggaran DPRD Riau. Hal ini terungkap dalam rapat dewan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Beberapa kali pemprov minta ditunda dengan alasan belum bisa merinci realisasi anggaran. Tapi dalam pembahasan, pemprov tidak bisa apa yang sudah mereka lakukan," ujar Anggota Banggar, Zukri Misran, Kamis (17/7).

Sikap TAPD tersebut tidak menyelesaikan persoalan minimnya

realisasi anggaran. Kondisi ini dikhawatirkan akan mengganggu perekonomian masyarakat Riau secara umum. Dewan pun akan kebingungan menjelaskan kepada masyarakat penyebab lambannya pembangunan yang dialokasikan di APBD 2014.

"Kalau ada alasan yang jelas, kita bisa menjelaskan kepada masyarakat. Ini kita bicara perekonomian masyarakat. Kalau uang Rp 8 triliun tidak jalan, apa yang mau bergerak ekonomi masyarakat," sebut Zukri.

Kegiatan dan anggaran yang

dialokasikan dalam APBD dan memiliki payung hukum perda tidak bisa serta-merta dicoret pelaksanaannya oleh individu tertentu. "Yang bisa menganulir kegiatan itu aturan bukan individu pejabat di pemprov. Ini peraturan daerah," tegasnya.

Banggar meminta seluruh SKPD menyampaikan kegiatan mereka agar evaluasi APBD Riau 2014 menjadi jelas. Program mana saja yang telah dilaksanakan juga akan terlihat secara keseluruhan dari kinerja SKPD.

Namun permintaan Banggar itu belum diberikan oleh SKPD. Permasalahan ini dikhawatirkan akan merembet kepada proses pengajuan APBD Perubahan. "Kalau gubernur ingin APBD Perubahan, evaluasi dulu anggaran murni. Evaluasi setiap SKPD, apa sebabnya realisasi minim," urai dia. (iam)